

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat dan canggih dibuktikan dengan banyaknya bermunculan perangkat teknologi sebagai sarana penunjang hidup masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, sosial, organisasi, maupun bisnis. Perkembangan teknologi tersebut juga memicu dan mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Indonesia harus memiliki sistem informasi yang baik, apabila ingin tetap bersaing dengan negara lain. Sistem informasi harus dikelola sedemikian rupa agar dapat meningkatkan kualitas komunikasi di dalam suatu organisasi, dengan meningkatnya kualitas komunikasi di dalam suatu organisasi maka semakin baik pula integritas organisasi tersebut.

Bidang akuntansi tidak luput dalam perkembangan teknologi sistem informasi. Sistem informasi dalam bidang akuntansi disebut Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan komponen yang saling bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi akuntansi.

Sistem informasi berperan dalam bidang akuntansi karena sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji. Tidak terkecuali dengan sistem informasi di pemerintahan yang juga menuntut sistem informasi lebih baik untuk mendukung agar informasi di bidang

keuangan daerah dihasilkan dengan tepat dan sesuai yang diharapkan. Pemerintah Indonesia tidak akan diam dan nyaman dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang lama, karena sistem harus terus berkembang mengikuti tuntutan dan kebutuhan dari para pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi/Pemerintah, dinyatakan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap Entitas Pelaporan, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggung jawaban keuangan negara.

Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sehingga terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia.

Desentralisasi menghasilkan daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat tidak seperti pada saat orde baru yang mana organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat, oleh karena hal tersebut saat ini sistem informasi di tiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Untuk menghasilkan laporan yang baik maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi berdasarkan Permendagri Nomor. 13 tahun 2006, Tentang Pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan dengan Permendagri No.59 tahun 2007 yaitu menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (*cash to wards accrual*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Pada Sistem Akuntansi di Pemerintahan Daerah, ketentuan umum prosedur akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam penelitian Musdalifah (2017) menyatakan bahwa sistem informasi pemerintah mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah, sistem informasi yang baik, bisa menciptakan kesatuan gerak dan

langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem informasi antar lembaga/dinas tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Wati (2014) menyatakan dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintahan diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Menurut Wilkinson *et al* (1989) laporan keuangan yang berkualitas hanya dihasilkan melalui penerapan sistem informasi akuntansi yang berkualitas pula. Informasi tersebut harus mendukung kebutuhan informasi dari manajemen. Sistem informasi akuntansi dibangun untuk menyediakan informasi yang digunakan untuk operasi dan pengambilan keputusan. Susanto (2013:374) menyatakan “Peran mendasar sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah sebagai penampung dan pengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas”.

Melihat pentingnya peran sistem informasi akuntansi di dalam sebuah organisasi tersebut, maka sistem informasi akuntansi tersebut harus berkualitas. Kualitas sistem informasi akuntansi adalah karakteristik dari sistem pengolahan data akuntansi menjadi informasi keuangan yang bernilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik dari kualitas sistem informasi akuntansi meliputi kemudahan penggunaan, informasi yang dihasilkan tepat waktu (*timeliness*), fleksibel (kemampuan berubah sesuai kebutuhan) dan reliabel (tingkat kepercayaan sistem). Apabila sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah berkualitas, maka diharapkan tujuan dari pemerintah untuk menghasilkan informasi atas kinerja mereka terutama dalam mengelola dana masyarakat tercapai dan dapat memuaskan semua pihak.

Namun demikian, seperti yang disampaikan Kusumawardani (2009) bahwa masih banyak permasalahan sistem informasi akuntansi yang sering terjadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti kurangnya pemahaman OPD tentang aset yang dimiliki sehingga dalam proses input tidak tepat, masih sering berubahnya regulasi mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya perbedaan ketentuan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, jangka waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban terlalu mendadak. Hal tersebut menyebabkan pengembangan atau penyesuaian sistem harus dilakukan secara berkala dan memerlukan persiapan. Pelatihan kepada pemakai sistem juga harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat input data kedalam sistem.

Adapun fenomena permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kota Medan yang masih terus terjadi adalah Pemerintahan Daerah Kota Medan telah menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penyusunan laporan keuangan APBD tahun 2018. Dalam *Tobasatu.com* Juli 2019, Nasution mengatakan sulitnya pendataan aset membuat Pemko gagal memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya mendapatkan predikat WDP, Sulitnya menginput data dari beberapa bangunan seperti Puskesmas dan Sekolah yang dibangun tanpa diketahui kapan dan siapa yang membangun, kemudian diserahkan kepada Pemerintah tanpa melengkapi dokumennya. Kurang handalnya sistem pendataan menjadi persoalan disini dan telah berakibat kepada laporan keuangan APBD yang kurang maksimal. Pada kasus ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Medan belum menghasilkan informasi yang akurat.

Tidak hanya itu, seperti yang dilansir dalam *medanbisnisdaily.com* Ambarita selaku kepala BPK Perwakilan Sumut mengatakan selama tiga tahun berturut-turut Pemko Medan baru menyerahkan LKPD di bulan Juni, Ambarita juga mengatakan, dengan keterlambatan menyerahkan LKPD, maka bisa dipastikan pemerintah daerah tersebut tidak akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentunya akan berdampak pada tidak adanya insentif dari Kementerian Keuangan. Pada kasus ini, menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah belum menghasilkan informasi yang tepat waktu.

Dalam berita yang dimuat *monitor.co.id* tahun 2017, Amisepti mengatakan pengelolaan dan penatausahaan aset menjadi hal yang sangat penting, temuan yang paling dominan yang menyebabkan Pemerintah Daerah gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat di aset. Nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini pemda harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusutan, penilaian kembali, pelepasan aset, dan inventarisasi aset. Pemda perlu memahami secara detail PSAP Nomor 7 dan Bultek Nomor 15 tentang aset tetap.

Dalam berita yang dimuat *Mediacenter.garutkab.go.id* tahun 2017, Antadiredja menyatakan bahwa pemerintah memiliki peranan penting untuk mengembangkan infrastruktur TIK dan membangun sistem informasi agar pengguna dapat memaksimalkan segala macam aktivitasnya untuk keperluan lingkungan pemerintah terutama dalam pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laudon & Laudon (2017:448) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak diperlukan untuk memastikan sebuah sistem menerima pendanaan dan sumber daya yang cukup agar bisa berhasil.

Permasalahan teknologi informasi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh menteri komunikasi dan informasi, dalam berita yang dimuat pada *www.Viva.co.id* tahun 2017, Rudiantara menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia masih rendah. Sedangkan pengguna sistem harus memiliki kemampuan yang memadai. Seperti yang dikatakan Stair & Reynold (2012:15), bahwa pengguna menjadi unsur

penting dalam mengimplementasikan sistem informasi, mereka membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sistem informasi pada organisasi.

Dalam penelitian Afrizon, dkk (2019), menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap sistem informasi akuntansi. Kemudian dalam penelitian Dilla (2017), menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Begitu pula dalam penelitian Murtadho, dkk (2018), yang menyatakan bahwa kompetensi pengguna dan dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi, diantaranya komitmen pada organisasi, kompetensi pengguna, ukuran organisasi, struktur organisasi, visi organisasi, dukungan manajemen puncak dan masih banyak faktor yang diuji lainnya. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dukungan manajemen puncak dan kompetensi pengguna untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak dan Kompetensi Pengguna terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dibuat terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan belum menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
2. Sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kota Medan belum menghasilkan informasi yang tepat waktu
3. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan agar masalah yang diteliti tidak meluas, penelitian ini difokuskan pada pengujian pengaruh dukungan manajemen puncak dan kompetensi pengguna terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan?
2. Apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi tambahan informasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Indonesia terkhusus dalam bidang sistem informasi akuntansi untuk memaksimalkan kualitas sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang pengaruh dukungan manajemen puncak dan kompetensi pengguna terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
3. Bagi manajemen organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan mengenai kualitas sistem informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Daerah, bagi manajer organisasi agar mengupayakan pemaksimalan penggunaan sistem informasi akuntansi.